PELAKSANAAN PROSES SOSIALISASI POLITIK TENTANG FUNGSI-FUNGSI BADAN PERWAKILAN DESA (BPD) DI BADAN PERWAKILAN DESA (BPD) DESA TAMBANG EMAS[1]

Oleh : Ahmad Khoiruddin AS[2], Yoserizal[3], Kusdarini[4]

Abstract

This article is a result from research regarding execution process political socialization about Body function Delegation of Countryside (BPD) in Body Delegation of Countryside BPD Tambang Emas of Pamenang Sub-Province Merangin Provinsi Jambi. Result of this research lay open that execution process political socialization in BPD Tambang Emas at BPD elite storey level obtained from Local Government Sub-Province Merangin passing political education: Or upgrading training. While at BPD member storey: level obtained from working team. Constraints in execution process political socialization is BPD perception that still differs, experience punish and low still political, BPD member amount and financing which many.

Pendahuluan

Desa Tambang Emas Kecamatan Pamenang merupakan salah satu desa di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah. Luas Kabupaten Merangin adalah 7. 679 Km2 terbagi menjadi 4.607 Km2 dataran rendah dan 3.072 Km2 dataran tinggi dengan jumlah penduduk 260.792 jiwa terdiri dari 133. 333 jiwa laki-laki dan 127. 459 jiwa perempuan dan terbagi menjadi 7 kecamatan: Jangkat, Muara Siau, Pemenang, Bangko, Sungai Manau, Tabir dan Tabir Ulu.

Kehadiran otonomi daerah berdasarkan undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah umumnya di Indonesia dan khususnya di Kabupaten Merangin menjadi paradigma baru bagi perwujudan kehidupan demokrasi. Karena salah satu perwujudan demokrasi tersebut pada tataran Pemerintahan Desa tersirat makna pembentukan Badan Perwakilan Desa (BPD) dengan fungsi: Pengayoman, legislasi, mengawasi dan menampung aspirasi masyarakat. Namun harapan dari pembentukan Badan Perwakilan Desa (BPD) belum sepenuhnya terpenuhi sebagaimana keinginan yang ada, padahal pembentukan Badan Perwakilan Desa (BPD) diharapkan mampu menciptakan kehidupan demokratisasi di Pemerintahan Desa.

Khusus pada Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Tambang Emas Kecamatan Pamenang fenomena itu terlihat diantaranya: anggota BPD memandang BPD sebagai lembaga baru sehingga masih sulit melaksanakan fungsi-fungsinya, pengaruh tingkat

---

[1] Skripsi Sarjana Ilmu Politik FISIP Universitas Andalas. 2004

[2] Sarjana Jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Andalas 2004

[3] Dosen Jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Andalas, saat ini menjabat sebagai Ketua Jurusan Ilmu Politik Periode 2004-2008.

[4] Dosen Jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Andalas

pendidikan anggota BPD yang tidak sama, adanya orientasi 'materialistik' dan adanya nuansa 'konflik' antara BPD dan Pemerintah Desa. Sehingga dari kondisi itulah diperlukan suatu usaha penanaman nilai-nilai politik melalui sosialisasi politik.

Berdasarkan masalah tersebut ketidakmampuan BPD tentu akan menjadi faktor penghambat 'kemandekan' demokratisasi di Pemerintahan Desa, maka perlu diketahui bagaimana pelaksanaan proses sosialisasi politik tentang fungsi-fungsi Badan Perwakilan Desa (BPD) di Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Tambang Emas.

Adapun tujuannya secara umum dari penelitian ini untuk mendeskripsikan pelaksanaan proses sosialisasi politik tentang fungsi-fungsi Badan Perwakilan Desa (BPD) di Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Tambang Emas. Dan secara khusus untuk mendeskripsikan fungsi-fungsi Badan Perwakilan Desa (BPD) di Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Tambang Emas, untuk mendeskripsikan agen-agen pelaksanaan proses sosialisasi politik di Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Tambang Emas, untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk pelaksanaan proses sosialisasi politik di Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Tambang Emas dan untuk mendeskripsikan kendala-kendala pelaksanaan proses sosialisasi politik di Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Tambang Emas. Sedangkan manfaat dari penelitian ini diharapkan secara teoritis menambah ilmu dan melihat realita dan teori yang ada. Dan secara praktis menjadi bahan masukan bagi BPD dan Pemerintah.

Teori yang dipakai antara lain adalah teori Gabriel Almond tentang sosialisasi politik, dimana sosialisasi politik merupakan proses 'induksi kedalam budaya politik' dan membawa perkembangan serangkaian prilaku diantara anggota dari sistem itu. Kemudian sosialisasi politik dapat 'ditransmisikan' oleh agen-agen politik seperti keluarga, pendidikan, kelompok sebaya, kelompok kerja, kelompok agama, kelompok senggang dalam sistem politik dan media massa. Bentuk dari sosialisasi politik dapat berbentuk langsung: imitasi, antisipatoris, pendidikan politik dan pengalaman politik. Sedangkan bentuk secara tidak langsung: pengoperasian interpersonal, magang dan generalisasi.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan tipe pelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, pemilihan informan dilakukan dengan *'purposif sampling'*, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Dan lokasi penelitian adalah BPD Desa Tambang Emas Kecamatan Pamenang Provinsi Jambi dan analisa data dilakukan baik secara emik atau etik.

Deskripsi Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah BPD Desa Tambang Emas terletak di Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Propinsi Jambi. Dimana Desa Tambang Emas mempunyai luas 2.713.5 Ha dibagi menjadi 6 kelompok dusun: Rimba Mulya, Pulau Teratai, Rasau Indah, Subur Sari, Rawa Sari dan Tanjung Emas.

Adapun profil BPD Desa Tambang Emas terdiri dari 16 orang anggota terdiri dari 1 orang Ketua, 2 orang Wakil Ketua, 12 orang anggota yang dibagi menjadi 3 komisi: komisi pemerintahan dan keuangan, komisi perekonomian dan pembangunan dan komisi kesejahteraan rakyat serta 1 orang sekretaris.

Berikut ini struktur dan nama anggota BPD Desa Tambang Emas.

a. Struktur BPD Desa Tambang Emas

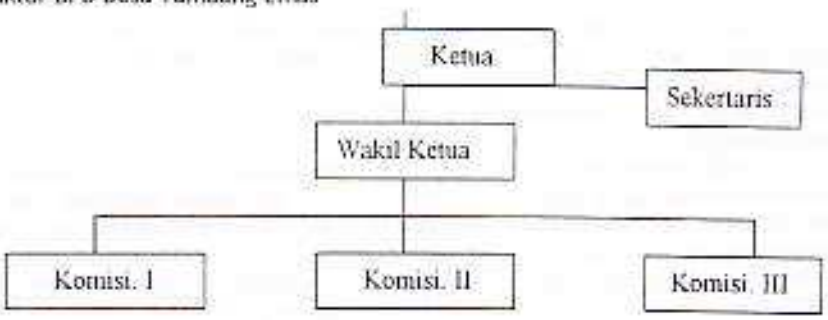

b. Anggota BPD Desa Tambang Emas

No	Nama	Umur (Umur)	Tingkat Pendidikan	Pekerjaan	Jabatan
1	Sutardi	50	SLTA	PNS	Ketua
2	Agust Suroso SP.d	41	S.1	Guru	Wakil Ketua
3	Darni Sudarsono	36	D. II	Guru	Wakil Ketua
4	Sutarto	50	SLTA	Swasta	Anggota
5	E. Kusnadi	37	SLTP	Tani	Anggota
6	Hanafi SH	41	S. 1	Swasta	Anggota
7	Iwan	30	SLTP	Swasta	Anggota
8	Bambang Wasgito	24	SMK	Tani	Anggota
9	Suparli	37	SLTP	Tani	Anggota
10	Suyoto	38	SPG	Guru	Anggota
11	Yunadi	29	SLTA	Swasta	Anggota
12	Ade Suherman	33	SLTP	Tani	Anggota
13	Maman S	32	SLTP	Swasta	Anggota
14	Ahmad Taufik	27	SLTA	Swasta	Anggota
15	A Barkah	37	D. II	Guru	Anggota
16	Budi Suprihatin	25	SLTA	Tani	Sekertaris

Sedangkan sejarah pembentukan BPD Desa Tambang Emas berdasarkan adanya undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan dasar hukum yang dipakai Peraturan Daerah Kabupaten Merangin No. 17 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa. Dan kelengkapan BPD Desa Tambang Emas yang dimiliki baru berupa struktur organisasi dan tata tertib BPD No. 1 Tahun 2003, sedangkan sarana/ prasarana belum memiliki.

Gambaran Pelaksanaan Proses Sosialisasi Politik Tentang Fungsi-Fungsi BADAN PERWAKILAN DESA (BPD) DI BPD DESA TAMBANG EMAS

Setelah dilakukan penelitian pelaksanaan proses sosialisasi politik tentang fungsi-fungsi Badan Perwakilan Desa (BPD) di Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Tambang Emas diperoleh suatu hasil:

Fungsi-Fungsi Badan Perwakilan Desa (BPD)

Fungsi Mengayomi

Pada pelaksanaan fungsi mengayomi adat istiadat di BPD Desa Tambang Emas telah memberikan ruang pengayoman terhadap adat dan budaya tradisional masyarakat desa. Pengayoman terhadap adat dan budaya tersebut diberikan karena Desa Tambang Emas dihuni oleh beberapa suku bangsa di Indonesia seperti suku jawa, suku minang, suku sunda, suku melayu, suku batak dan lain-lain. Hal itu terlihat misalnya pada pelaksanaan upacara pernikahan dan kematian adat atau budaya yang dipakai biasanya berkaitan erat dengan asal usul daerah meskipun terkadang ditemui 'kolaborasi' diantara adat yang ada.

Sedangkan dalam hal mengembangkan hukum adat serta memberikan sanksi adat misalnya terhadap pencurian, perzinahan dan lain-lain yang terjadi di desa, BPD Desa Tambang Emas melakukan kerja sama dengan lembaga khusus yang dibuat oleh masyarakat desa yakni Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Keberadaan LPM yang anggota-anggotanya terdiri dari ninik mamak dan tokoh masyarakat tentu akan sangat membantu fungsi-fungsi yang diemban oleh BPD.

Fungsi Legislasi

Pada pelaksanaan fungsi legislasi di BPD Desa Tambang Emas belum dapat terlaksana dengan baik, sehingga yang terjadi BPD Desa Tambang Emas melakukan jalan pintas yakni melakukan peminjaman Perdes pada desa lain yang telah terlebih dahulu merumuskan kemudian disesuaikan dengan keadaan Desa Tambang Emas.

Hal itu dilakukan karena perumusan Perdes yang sebenarnya diusulkan oleh Desa belum terlaksana, walaupun BPD Desa Tambang Emas sesuai aturan telah mengirimkan surat sebanyak 3 kali kepada Pemerintah Desa untuk membuat rancangan Peraturan Desa (Perdes) Desa Tambang Emas untuk dibahas bersama BPD Desa Tambang Emas. Tetapi kenyataan Pemerintah Desa sampai saat ini tidak memenuhi isi surat BPD tentang pembuatan rancangan Perdes. Untuk mengatasi masalah pembuatan Perdes BPD dan Pemerintah Desa kemudian disepakati merumuskan bersama, namun sewaktu rancangan itu mulai ditawarkan Pemerintah Desa dan BPD mengajukan beberapa pertimbangan terjadilah 'konflik' atas masalah-masalah pertanahan dan keuangan.

Fungsi Pengawasan

Pada pelaksanaan fungsi pengawasan sebagaimana fungsi legislasi yang belum berjalan maka fungsi ini belum mampu dijalankan pula. Walaupun fungsi pengawasan dapat meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa.

Namun justru yang terjadi adalah 'konflik' akibat kecurigaan-kecurigaan Pemerintah Desa terhadap BPD. Sehingga sesuai dengan teori pendekatan sosiologi yang dikemukakan George E.G. Catlin tentang "Fenomena Kontrol" adalah dan adanya kontrol

yang berbentuk pengawasan dari seseorang terhadap orang lain, dari individu terhadap kelompok, atau dari kelompok terhadap kelompok yang lain itu. Maka Catlin percaya bahwa semua organisasi sosial yang ada akan terus mempertahankan dalam mengukuhkan kelembagaan organisasinya.

Fungsi Menampung Aspirasi Masyarakat

Pada pelaksanaan Fungsi menampung aspirasi masyarakat di BPD Desa Tambang Emas dari hasil penelitian di dapat suatu gambaran bahwa BPD Desa Tambang Emas membuka lebar kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi baik secara langsung ke rumah anggota BPD, melalui surat, melalui rapat-rapat atau pertemuan-pertemuan. Fungsi ini mulai terealisasi pada pertemuan-pertemuan masyarakat baik pada ruang lingkup Dusun, Rukun Warga dan Rukun Tetangga melalui musyawarah warga, 'arisan', 'yasinan', 'kenduri' dan sebagainya menjadi sarana aspirasi masyarakat terhadap pembangunan desa. Sedangkan pada masalah-masalah pribadi misal pertanahan, perkebunan (sawit) dan lain-lain biasnya masyarakat langsung menyampaikan aspirasi kepada Ketua BPD.

Pelaksanaan Proses Sosialisasi Politik Tentang Fungsi-Fungsi BPD

Agen Sosialisasi Politik di BPD

Sosialisasi politik menurut David Easton dan Jack Dennis dapat *'ditransmisikan'* oleh beberapa agen yakni keluarga, sekolah, kelompok sebaya, kelompok kerja, kelompok agama, kelompok-kelompok senggang dalam keadaan sekarang dari sistem politik dan media massa. Sedangkan dalam teori sosialisasi politik yang dikemukakan Gabriel Almond bahwa sosialisasi politik merupakan proses *"Induksi kedalam budaya politik"* dan membawa perkembangannya serangkaian prilaku diantara anggota para anggota sistem itu.

Dari beberapa agen-agen sosialisasi politik diatas, agen sosialisasi politik dalam proses pelaksanaan sosialisasi politik tentang fungsi-fungsi BPD di BPD Desa Tambang Emas dapat dikelompokan menjadi dua. Pertama pada tingkat elit BPD (Ketua dan Wakil Ketua) agen sosialisasi politik di dapat dari kelompok kerja (Pemda:Kabag Hukum dan Perundang-undangan, Kabag Tata Pemerintahan dan Camat). Sedangkan pada tingkat anggota BPD di dapat dari kelompok kerja (Ketua dan Wakil Ketua) dan media massa.

Bentuk-Bentuk Sosialisasi di BPD

Adapun bentuk-bentuk sosialisasi politik menurut Masoed Mas'ud dibagi menjadi dua metode, yakni secara tidak langsung dan langsung. Metode sosialisasi politik tidak langsung meliputi tiga ragam kemungkinan metode belajar yang lebih khusus: pengoperasian interpersonal *(interpersonal transference)*, magang *(apprenticeship)* dan generalisasi *(generalization)*. Sedangkan metode sosialisasi politik secara langsung ragam kemungkinan dapat dibedakan: Imitasi, sosialisasi politik antisipatoris, pendidikan politik dan pengalaman-pengalaman politik.

Dari metode sosialisasi politik diatas, metode atau bentuk sosialisasi politik di BPD Desa Tambang Emas juga dibagi menjadi dua yaitu pada tingkat elit BPD (Ketua dan Wakil Ketua) bentuk sosialisasi dilakukan secara langsung melalui pendidikan politik (Pelatihan atau Penataran) dan pada tingkat anggota BPD bentuk sosialisasi politik dilakukan secara langsung tetapi melalui pengalaman-pengalaman politik.

Tahapan Pelaksanaan Sosialisasi Politik

Ada tiga tahapan sosialisasi politik dalam rangka menciptakan proses pembangunan: Pengenalan aspirasi dan kepentingan politik, perjuangan mengakomodasikan kepentingan rakyat dan pengkomunikasian kepentingan-kepentingan rakyat.

Dari ketiga tahapan proses pembangunan diatas di BPD Desa Tambang Emas sebagai lembaga politik masyarakat desa yang *'notabene'* masih minim pengetahuan tentang kehidupan politik belum terlihat secara secara jelas, terarah dan berkelanjutan. Fenomena itu terlihat bahwa anggota BPD tidak dipahamkan terlebih dahulu tentang pengenalan aspirasi dan kepentingan politik yang diembannya, namun telah diperkenalkan juga pada usaha perjuangan dan pengkomunikasian kepentingan rakyat.

Kendala Pelaksanaan Sosialisasi Politik di BPD

Dari hasil pengamatan ada beberapa kendala dalam pelaksanaan proses sosialisasi politik di BPD Desa Tambang Emas diantaranya: *pertama*, dari BPD, dimana BPD merasa mempunyai kekuasaan sangat besar untuk selalu mengontrol dan mengawasi Pemerintah Desa, terkadang BPD lebih nampak sebagai 'penghakim' dari pada sebagai mitra. Dan *kedua*, Dari Pemerintah Desa, dimana akibat sistem 'sentralistik' di masa lalu, apalagi Kepala Desa dan perangkat desa sebagaian besar produk Orde Baru, maka kehadiran BPD dianggap lebih sebagai penghalang kerja dari pada sebagai mitra.

Berikut ini adalah pola hubungan antara BPD, Kepala Desa dan masyarakat.

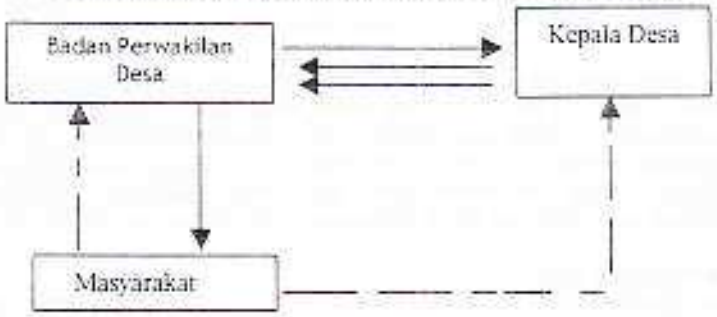

Keterangan:

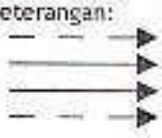

= Aspirasi
= Peraturan Desa/ Kontrol
= Pertanggungjawaban
= Aspirasi/ kontrol

Kendala-kendala di BPD sebagaimana dijelaskan diatas memang sangat dipengaruhi faktor *'intern'* dalam desa. Tetapi ada juga faktor *'ekstren'* yang juga merupakan kendala terbesar dari pelaksanaan proses sosialisasi politik di BPD. Faktor yang tidak bisa dipungkuri dari pelaksanaan itu bahwa hari ini Pemerintah Daerah belum

mampu melakukan sosialisasi politik untuk seluruh anggota BPD. Kenyataan itu didasari beberapa alas an: *pertama*, jumlah anggota BPD sangat banyak. *Kedua* minimnya anggaran untuk proses sosialisasi politik. Dan *ketiga*, masih lemahnya pemahaman dan minat pemerintah 'setengah hati' terhadap pembentukan BPD.

PENUTUP

Pembentukan BPD sebagai paradigma baru dalam Pemerintahan Desa memang diharapkan menciptakan suatu perubahan pembangunan *dari 'sentralistik'* kepada *'bottom up'*. Tetapi kalau melihat pemahaman anggota BPD tentang fungsi-fungsinya nampaknua masih memerlukan waktu fungsi itu dapat berjalan. Hal itu dikarenakan walaupun secara umum anggota BPD telah memahami fungsi-fungsinya, tetapi pemahaman itu baru dalam tataran 'kognitif'. Oleh karena itu masih sangat diperlukan sosialisasi politik secara bertahap dan berkesinambungan.

Untuk menciptakan BPD sebagai lembaga demokrasi khusus di BPD Desa Tambang Emas dan umumnya BPD Kabupaten Merangin dari hasil penelitian ada beberapa saran: *Pertama*, untuk Pemerintah: pendidikan politik adalah kemestian dalam proses politik lebih-lebih di BPD. Kemudian hendaknya ada evaluasi rutin, penganggaran dan lain-lain. *Kedua*, untuk BPD: Lakukan pemahaman fungsi BPD dari banyak lembaga politik yang ada. Kemudian jangan lagi menggunakan 'budaya menunggu', bangun komunikasi dengan Pemerintah Desa dan masyarakat dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

Budiardjo, Miriam Prof. Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1998.

Christina. Dkk, Jaman Daulat Rakyat dari otonomi daerah ke demokratisasi, Yogyakarta: Lapera pustaka utama, 2001.

Dwivedi. Anju, Metodelogi Pelatihan Partisipatif, Bantul: Pondok Edukasi, 2003.

Gould. Carol C, Demokrasi di tinjau kembali, Yokyakarta: PT Tiara Wacana, 1993.

Huntington. P. Samuel. Gelombang Demokratisasi Ketiga, Jakarta: Grafiti, 2001.

Himawan S. Dkk, Politik Pemberdayaan, Yogyakarta: Pondok Pustaka Jogja, 2003.

Juliantara. Dadang, Arus Bawah Demokrasi. Otonomi dan pemberdayaan desa, Jogyakarta: Lapera Pustaka Utama, 2000.

Kwiet. Marry. Crisec & Kwiet. Robert W, Konsep dan Analisa Politik, Jakarta: Bina Aksara, 1986.

Kaho. Josef. Riwu, Drs, MPA. Propek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Kaloh. J. DR, Mencari Bentuk Otonomi Daerah. Suatu sulusi dalam menjawab kebutuhan local dan tantangan global, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.

Mas`oed. Mohtar Dr, Sosiologi Politik, Yogyakarta: PAU-Studi Sosial UGM, 1987.

_____, Negara, Kapital dan Demokrasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset: 1999.

Maran. Rafael Raga, Pengantar Sosiologi Politik, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001.

Rush Michael & Philip Althoff, Pengantar Sosiologi Politik, Jakarta: PT Raja Grafindo: 2001.

Sanit. Arbi Drs, Perwakilan Politik Di Indonesia, Jakarta: PT Rineka Cipta: 1985.

Varma. SP, Teori Politik Modern, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.

Wasistiono. Sadu, Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah, Bandung: AIQaprint Jatinangor, 2001.

Buku Metodologi

Meleong, Lexy. J. Dr. MA, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rusda Karya, 2002.

Nasution, Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif, Bandung: Tarsito, 1992.

Singarimbun, Metode Penelitian Survey, Jakarta: LP3ES, 1985.

Buku Undang-Undang/ Perda

UUD'45 dan Amandemennya, Surakarta: PT Pabelan, 2000.

Undang-Undang Otonomi Daerah 1999 dan Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah 2000, Jakarta: CV Tamita Utama, 2001.

Merangin Dalam Angka Tahun 2000, BPS Kabupaten Merangin Jambi.

Merangin Dalam Angka Tahun 2002, BPS Kabupaten Merangin Jambi.

Perda Kabupaten Merangin No. 17 Tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa, Setda Kabupaten Merangin: Bagian Hukum dan Organisasi, 2002.